

PERAN POLITIK PEMIMPIN PONDOK PESANTREN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021-2023

(The Political Role Of Islamic Boarding School Leaders In Resolving Leadership
Dualism Conflicts In Padang Lawas District In 2021-2023)

Yazid Hidayat Hasibuan¹, Sahdin Hasibuan², Muhammad Ali Azmi³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : yazidhidayathsb00@gmail.com¹, sahdinhsb@uinsu.ac.id²

Abstract

This research discusses leadership dualism in Padang Lawas district, this leadership dualism is a conflict that must be resolved so that it does not get worse, in this research the researcher focuses on studying how to resolve this conflict and the main thing in this research is taking and making references to the political role of Islamic boarding school leaders in this matter. This research used field research, which is research carried out directly in the field, namely in Padang Lawas Regency. This research uses descriptive research. Descriptive research is carried out to determine the value of each variable, either one or more variables. The nature of this research is independent, that is, without making relationships or comparisons with other variables. The conclusion of this research is that in resolving leadership dualism in Padang Lamas, Islamic boarding school leaders believe that conflicts should be resolved by prioritizing the principles of deliberation and consensus and paying attention to applicable legislation.

Keywords: *Politics, Islamic Boarding Schools, Leadership Dualisms*

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang dualisme kepemimpinan di kabupaten padang lawas, adanya dualisme kepemimpinan ini menjadi konflik yang harus di selesaikan supaya tidak menjadi lebih buruk, dalam penelitian ini peneliti fokus mengkaji tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut dan utamanya dalam penelitian ini adalah mengambil dan membuat rujukan bagaimana peran politik pemimpin pondok pesantren dalam hal ini. penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan yaitu di Kabupaten Padang Lawas. Dalam

Article History

Received: Feb 2025

Reviewed: Feb 2025

Published: Feb 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.36
5

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. Sifat penelitian ini independen, yaitu tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam menyelesaikan Dualisme kepemimpinan di Padang lawas pimpinan pesantren berpendapat konflik seyogyanya diselesaikan dengan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat serta memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Keyword : *Politik, Pondok Pesantren, Dualismes Kepemimpinan*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sebuah konstitusi bernama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Dalam UUDNRI Tahun 1945, kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian Negara Indonesia adalah negara konstitusi, bersendikan demokrasi dan berbentuk Republik kesatuan.¹

Fenomena dualisme kepemimpinan terlihat pada munculnya dua kubu antara Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap dengan sebutan TSO (Tongku Sutan Oloan) dengan Wakil Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi Pasaribu dengan sebutan AZP telah memegang bersama-sama tanggung jawab Pemerintah Padang Lawas. Dalam hal ini terjadi dualisme kepemimpinan dalam jabatan Kepala Daerah sehingga menimbulkan banyaknya masalah dalam tata penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Hal ini akan berdampak pada tersendatnya kinerja pemerintahan dalam hal administrasi serta pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan sehingga memunculkan berbagai masalah.

Kisruh pemerintahan di Kabupaten Padanglawas semakin carut marut pasca keluarnya surat Menteri Dalam Negeri RI nomor: 100.2.7/1284/SJ, tertanggal 2 Maret 2023. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengatakan bahwa pihaknya masih tetap belum mau mengaktifkan Ali Sutan Harahap alias Tongku Sutan Oloan (TSO) sebagai Bupati

¹ Muliansyah Abdurrahman Ways.Political,Ilmu Politik, Demokrasi,Partai Politik Dan Welfare State. (Cet. 1, Yogyakarta:Mantrijeron. 2015), h. 131.

Padang Lawas sebagaimana yang tertuang dalam surat Mendagri tersebut. Karena Edy Rahmayadi menilai kondisi kesehatan Ali Sutan Harahap atau yang akrab disapa TSO belum pulih seratus persen sehingga pada saat itu dianggap belum memungkinkan untuk memimpin Padang Lawas

Presiden, gubernur, bupati, walikota, dan pemimpin lain dibawahnya hanya boleh ada satu pemimpin dalam suatu daerah teritorial. Tidak boleh ada dua pemimpin atau bahkan lebih dari dua pemimpin. Secara syariat sebagaimana keterangan Imam Al-Mawardi berikut ini:

فَأَمَّا إِقَامَةُ إِمَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَبِلَدٍ وَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا

Artinya “*Adapun pengangkatan dua atau tiga pemimpin pada periode pemerintahan yang sama dan untuk wilayah teritorial yang sama tidak boleh menurut ijmak ulama.*”²

Larangan Islam atas keberadaan dua pemimpin atau lebih di satu daerah jelas menyebabkan Pertarungan karena adanya dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan jelas menyebabkan keributan karena adanya dua orang pemimpin yang memiliki kewenangan dan otoritas yang sama. Kita sulit membayangkan bagaimana jika terdapat lebih dari dua pemimpin yang memiliki otoritas yang sama dalam periode kepemimpinan yang sama. Sejarah juga membuktikan bahwa dualisme kepemimpinan berujung pada perebutan pengaruh dengan segala cara, Keributan atau kacau-balau. Pasalnya, dalam dualisme kepemimpinan tentu terdapat konflik kepentingan yang hampir tidak mungkin didamaikan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengisyaratkan bahaya dualisme kepemimpinan dengan mengingatkan agar menciptakan kondisi kepemimpinan tunggal dengan cara mematuhi seorang pemimpin yang sah di zamannya.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله عز وجل ضعيفا في بدنه.

وإذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله عز وجل قويا في بدنه، وإن وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا

Artinya, “*Diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. bahwa ia bersabda, „Jika kalian mengangkat Abu Bakar RA, niscaya kalian akan menemukan pemimpin yang kuat dalam agama Allah Swt. dan lemah fisiknya. Tetapi jika kalian mengangkat Umar RA, niscaya kalian mendapati orang yang kuat agamanya dan kuat fisiknya. Sedangkan jika kalian mengangkat Ali RA, niscaya kalian menemukan pemimpin*

² Imam Al-Mawardi. *Adabud Dunia wad Din* (Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H), h.97

yang dapat memberi petunjuk dan pemimpin yang mendapat petunjuk (dari Allah), Imam Al-Mawardi”.

Dalam Firman Allah berbunyi :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص: ٦٢)

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt.. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Swt. akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Qs Shad:88 : 26).³

Islam menghendaki umatnya bersatu dalam jamaah dan satu pemimpin. Karena itulah, Islam melalui lisan Nabi sallallahu’ alaihi wa sallam memberikan sanksi berat terhadap upaya yang mengarah kepada dualisme kepemimpinan. Hal ini tampak dalam hadits-hadits berikut:

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» / رواه مسلم

Artinya “Dari Abu Saeed Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika kesetiaan diberikan kepada dua khalifah, bunuhlah yang lain.” (Diriwayatkan oleh Muslim).

عن عرفجة بن شريح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشْتَقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» / رواه مسلم

Artinya “Dari hadis Arfaja bin Shurayh, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa datang kepadamu dan perintahmu itu semua didasarkan pada satu orang, dan ingin untuk mengobrak-abrik kekuasaanmu atau memecah belah kelompokmu, lalu bunuhlah dia.” (Diriwayatkan oleh Muslim).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم

³Alquran Terjemahan. Kemenag, (Jakarta jalan raya pondok rannggon, 2020).h.454

يقول: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ» / رواه مسلم

Artinya “Dari Abdullah bin Amr bin Al-Aas radhiyallahu ‘anhu keduanya - bahwa dia mendengar Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian Beliau bersabda: “Barangsiapa yang berjanji setia kepada seorang imam dan memberikan kepadanya kesepakatan tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia menaatinya semaksimal mungkin”. (Diriwayatkan oleh Muslim).

Hubungan Islam dan politik meskipun tidak bisa dipisahkan namun selalu menjadi perdebatan hangat baik di kalangan muslim sendiri maupun pada para Islamis. Perdebatan-perdebatan tentang isu khalifah atau format Negara yang dikehendaki selalu tidak menemukan satu jalan yang pasti di dunia Islam. Di satu pihak, para sarjana muslim menginginkan umat muslim berada di bawah satu kekuasaan. Pada pihak yang lain, mereka lebih setuju pada bentuk dan model pemerintah modern, dimana sistem ke khalifahan bukan lah harga mati bahkan dianggap tidak populer lagi.

Pemikiran politik Islam lebih cenderung bersifat filosofis teoritis daripada pragmatis. Konsep-konsep seperti itu selalu menawarkan sistem yang idealis dan multi tafsir. Yang terpenting adalah, Islam dan cita-citanya bisa diakomodir oleh sebuah ideologi politik apapun. Pada awal abad modern, keadaan dunia islam berada pada kondisi yang sangat memprihatikan sebagai umat yang pernah besar dan sangat disegani. Tokoh-tokoh yang muncul pada masa tersebut lebih terfokus kepada penyelesaian masalah umat muslim daripada menawarkan dan memperjuangkan sebuah negara.⁴

Dalam penyelesaian dualisme kepemimpinan, paradigma upaya pemimpin pesantren sebagai lembaga keagamaan penting untuk memberikan pandangan serta arahan dalam menyikapi konflik tersebut. Peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan penunjang suara politiknya. Dengan berbasis keagamaan santri dan masyarakat akan mendengar titah dan patuh (*saman wa thaatan*) kepada kyai. Keterlibatan figur pesantren dalam dunia politik dapat dipandang secara positif maupun negatif. Di satu sisi, keterlibatan mereka dapat memperluas jejaring dan akses politik bagi kalangan umat Islam, namun disisi lain keterlibatan itu menjadi penghambat bagi figur pesantren karena adanya stigma masyarakat awam yang memandang bahwa politik itu kejam dan kotor. Berdasarkan uraian di atas

⁴ Muhammad Taqî Mishba Yazdî, Buku Daras Filsafat Islam, penj. Musa Kazhim dan Saleh Bagir (Bandung, Mizan, 2003), h. 6.

maka yang menjadi problematika dalam pembahasan adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi peran pemimpin pesantren dalam menyikapi dualisme kepemimpinan di Kabupaten Padang Lawas, sehingga penulis tertarik untuk memilih judul “Peran Politik Pemimpin Pondok Pesantren Dalam Penyelesaian Konflik Dualisme Kepemimpinan Di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021-2023”

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Strauss dan Corbin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, mendeskripsikan pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan yaitu di Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. Sifat penelitian ini independen, yaitu tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis, dokumen, catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka.

Profil Kabupaten Padang Lawas

Secara astronomis, kabupaten Padang Lawas terletak antara 1 26' Lintang Utara dan 2 11' Lintang Selatan dan antara 91 01'–95 53' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Padang Lawas memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara – kabupaten Padang Lawas Utara
- b. Sebelah Selatan – kabupaten Pasaman (provinsi Sumatera Barat) dan kecamatan Siabu (kabupaten Mandailing Natal)
- c. Sebelah Barat – kecamatan Gunung Malintang (kabupaten Mandailing Natal), kecamatan Sayur Matinggi dan kecamatan Batang Angkola (kabupaten Tapanuli Selatan)
- d. Sebelah Timur – kabupaten Rokan Hulu (provinsi Riau)

Akhir tahun 2017, wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Sosopan (407,52 km²), Ulu Barumon (241,37 km²), Barumon (119,50 km²), Barumon Selatan (122,60 km²), Lubuk Barumon (300,23 km²), Sosa (611,85 km²), Batang Lubu Sutam (586,00 km²), Hutaraja Tinggi (408,00 km²), Huristak (357,65 km²), Barumon Tengah (443,09 km²), Aek Nabara Barumon (487,75 km²), Sihapas Barumon (144,43 km²). Kabupaten Padang Lawas memiliki 12 Kecamatan dimana Kecamatan Sosa merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 611,85 km² dan Kecamatan Barumon merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 119,50 km².

HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin “*Configere*” yang berarti ”saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya”.⁵ Konflik di latar belakang oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau

⁵ Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, S.S., M.A. .*Pengantar Sosiologi Dasar*,(Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011) 113

dengan kelompok masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri.

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Kunci untuk memahami Marx adalah idenya tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik⁶. Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Dari pernyataan tersebut, maka diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Umumnya konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan, seperti konflik yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut adanya sebuah kebijakan dari pemerintahan untuk menaikkan gaji para buruh.

2. Tahap-Tahapan Konflik

Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik⁷. Ada 5 Tahapan Konflik :

- **Pra-konflik.** Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan

⁶ Fred. Schwarz, *You Can Trust the Communists*. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. 1960) Hlm. 71

hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

- **Konfrontasi.** Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya
- **Krisis.** Tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain.
- **Akibat.** Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain, satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
- **Pasca-konflik.** Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik.⁸

3. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik adalah proses menangani dan menyelesaikan perbedaan atau perselisihan yang terjadi antara individu, kelompok, atau negara.⁹ Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, tergantung pada situasi dan skala konflik. Berikut adalah beberapa metode utama dalam penyelesaian konflik:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Arbitrasi
- d. Konsiliasi
- e. Adjudikasi
- f. Pendekatan Transformasi Konflik

⁸https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/bentukbentuk_konflik.html

⁹ Lihat John W. Burton, *Conflict Resolution: Its Language and Processes* (Scarecrow Press, 1996), h.

- g. Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- h. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

4. Pesantren

Secara terminologi istilah pondok sebenarnya berasal dari bahasa Arab “funduq” yang berarti rumah penginapan, ruang tidur dan asrama atau wisma sederhana.. Menurut Sugarda Poerbawaktja pondok adalah salah satu tempat pemondokan bagi para pemuda-pemudi yang mengikuti pelajaran-pelajaran agama Islam. Adapun istilah pesantren berasal dari kata santri. kata “santri” juga merupakan penggabungan antara dua suku kata bahasa sansekerta yaitu *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia yang baik.

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dibawah bimbingan seorang kyai. Asrama untuk para santri berada dalam kompleks pesantren dimana tempat tinggalnya kyai. Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang cukup unik karena memiliki elemen dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Adapun elemen-elemen Islam yang pokok yaitu: pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kyai dan santri. Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah pesantren. Setiap pondok pesantren memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, namun dibalik perbedaan itu masing-masing pondok pesantren memiliki kesamaan, kesamaan itulah yang disebut dengan ciri khas pesantren.

5. Dualisme Kepemimpinan

Dualisme dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah identitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal dari jaman plato dan aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Kepemimpinan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata “pimpin” memiliki arti perihal pemimpin atau cara memimpin. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh, dari pemimpin kepada pengikut atau bawahnya dalam upaya mencapai tujuan tertentu.² Beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli: Miftah Thoha,

mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Menurut A. Dale Timple, kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial di dalam mana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi. Dari sejumlah pengertian kepemimpinan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang pemimpin diantaranya tergantung pada teknik kepemimpinan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki.

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia tersebut dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut dengan Leadership (kepemimpinan) adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini perilaku dari seorang individu yang mampu mengkoordinasi aktifitas-aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Menurut Stoner, kepemimpinan dapat di definisikan sebagai sesuatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.¹⁰ Siagian merumuskan kepemimpinan sebagai suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.¹¹ Begitupun Hasibuan mendefinisikan kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi perilaku

¹⁰ Umam, Khaerul. 2012. Manajemen Organisasi. (Bandung: Pustaka Setia), h. 156

¹¹ Nawawi, Hadari & Hadari, M. Martini. 2004. Kepemimpinan yang Efektif. (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta). h. 113.

bawahan, agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

6. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah proses pemulihan hubungan yang rusak atau terganggu akibat konflik atau perselisihan.¹² Tujuan utama rekonsiliasi adalah untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan yang sempat terputus, dengan menciptakan suasana saling memahami, memaafkan, dan bekerja sama. Dalam konteks konflik, rekonsiliasi sering kali melibatkan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, pengakuan atas kesalahan, dan komitmen untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan.

Elemen Kunci Rekonsiliasi:

1. Pengakuan Kesalahan: Pihak-pihak yang terlibat harus mengakui kesalahan atau tindakan yang menyakiti satu sama lain, baik itu secara personal, kelompok, atau negara.
2. Pemaafan: Salah satu komponen penting dalam rekonsiliasi adalah kesediaan untuk memaafkan. Pemaafan memungkinkan kedua belah pihak melangkah maju tanpa beban permusuhan di masa lalu.
3. Pemulihan Kepercayaan: Proses rekonsiliasi harus melibatkan upaya untuk memulihkan kepercayaan yang hilang. Ini dapat dilakukan melalui komitmen yang nyata untuk menjaga hubungan baik dan tidak mengulangi konflik.
4. Dialog dan Komunikasi: Rekonsiliasi memerlukan dialog terbuka, di mana semua pihak yang terlibat dapat menyuarakan perasaan, kekhawatiran, dan keinginan mereka secara jujur. Dialog ini memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih dalam terhadap perspektif masing-masing pihak.
5. Restitusi atau Ganti Rugi: Dalam beberapa kasus, rekonsiliasi mungkin melibatkan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk tanggung jawab.

PEMBAHASAN

Dualisme Kepemimpinan Di Padang Lawas Tahun 2021-2023

¹² John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (United States Institute of Peace Press, 1997), h. 24.

Mengingat UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 78 ayat 2 huruf b.¹³ menjelaskan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap berturut-turut selama 6 bulan, maka H. Ali Sutan Harahap seharusnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Padang Lawas. Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah mungkin sudah terjadi. Banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan akhirnya wakilnya menggantikan jabatannya. Namun fenomena unik terjadi di Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara. Terjadi dualisme kepemimpinan, ada bupati dan ada plt. bupati. Bupati Padang Lawas yang dijabat oleh Ali Sutan Harahap alias Tongku Sutan Oloan (TSO) sedangkan Plt Bupati dijabat oleh Ahmad Zarnawi Pasaribu yang dulunya adalah Wakil Bupati mendampingi TSO.

a. Bermula Dari Penyakit Yang Diderita TSO

Sejak 2013, Pasangan Ali Sutan Harahap (TSO)-Ahmad Zarnawi berhasil memenangkan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas (Palas) periode 2014-2019. Kemesraan keduanya berlanjut pada periode kedua. Pada periode kedua untuk masa jabatan 2019-2024 mereka diusung 10 partai politik dengan 24 dari 30 jumlah kursi di DPRD setempat. Yaitu partai Golkar (5 kursi), PPP (4 kursi), PKB (3 kursi), PDI Perjuangan (1 kursi), Hanura (4 kursi), PBB (1 kursi), PKPI (1 kursi), Nasdem (1 kursi), Gerindra (2 kursi) dan partai PAN (2 kursi). Pemerintahan berjalan harmonis. Namun pada awal tahun 2021, Ali Sutan Harahap alias Tongku Sutan Oloan (TSO) mengalami sakit yang parah hingga beberapa bulan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Bupati. Pada tanggal 28 Mei 2021, Sekda Palas mengirimkan surat ke Pemprov Sumut untuk memberi informasi soal kondisi Bupati Padang Lawas.

Tanggal 9 Juni 2021, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberikan petunjuk melalui surat resmi perihal pendelegasian wewenang Bupati Padang Lawas kepada Wakil Bupati, Ahmad Zarnawi Pasaribu. Tiga hari kemudian, 11 Juni 2021, Bupati menerbitkan SK yang berisi pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada Wakil Bupati. Bupati kemudian melakukan perubahan SK sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2021. Kedua surat tersebut menggunakan cap jempol dan stempel Bupati Padang Lawas, bukan tanda tangan seperti biasa. Untuk memastikan kesehatan Bupati Palas, Gubernur Sumut pada 30 September 2021 mengirim tim observasi kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis saraf dan penyakit dalam. Tim observasi yang terdiri dari dokter spesialis syaraf dan spesialis penyakit dalam RS Haji Medan dan Dinas Kesehatan Pemrov Sumut

¹³ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

menyimpulkan Ali Sutan Harahap menderita sakit yang menimbulkan hendaya/hambatan berkomunikasi dan aktivitas motorik¹⁴.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dan surat dari Dirjen Otda Kemendagri Nomor 131.12/7584/OTDA pada 22 November 2021, Gubernur Sumut menerbitkan surat penunjukan Wakil Bupati Palas, Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Palas pada 24 November 2021. Keputusan ini diambil berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 78 ayat (2) huruf b¹⁵. "Kondisi sakit dan sehat itu adalah takdir, tidak ada yang menginginkan kondisi seperti ini terjadi. Namun bagi seorang kepala daerah, ada undang-undang yang mengaturnya agar penyelenggaraan pelayanan pemerintahan tidak terkendala. Selain itu, di poin ketiga surat Gubernur tersebut menjelaskan penunjukan Plt dilaksanakan sampai pulihnya kondisi kesehatan Bapak Ali Sutan Harahap," ungkap Zubaidi selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sumatera Utara (Sumut) kala itu. Zubaidi mengimbau apabila Ali Sutan Harahap sudah pulih kesehatannya maka dapat segera mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh tim medis independen. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kondisi kesehatannya sehingga dianggap layak kembali melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

b. Gubernur Edy dilaporkan ke Polda dan PTUN

Beberapa bulan setelah penunjukan Ahmad Zarnawi sebagai Plt Bupati, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dilaporkan ke polisi karena menonaktifkan Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap alias Tengku Sutan Oloan (TSO). Edy dilaporkan ke Polda Sumut pada Sabtu (4/6/2022¹⁶). Orang yang melaporkan Edy adalah keponakan TSO Donna Siregar. Deliknya, soal penyalahgunaan wewenang. Laporan itu tertuang dalam STTLP/B/986/6/2022/SPKT/POLDA SUMUT itu terkait pidana UU No 1 tentang KUHP pasal 421. Selain ke Polda Sumut, Edy juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). Laporan ke Polda Sumut dan gugatan ke PTUN Medan berdasarkan surat Gubernur

¹⁴ Tim Kesehatan RS Haji Medan dan Dinas Kesehatan Pemprov Sumut, "*Observasi Kesehatan Bupati Padang Lawas*," Laporan Observasi, 30 September 2021.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 66 ayat (1) huruf c.

¹⁶ Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dilaporkan ke Polisi," Laporan Polisi Polda Sumatera Utara, No. STTLP/B/986/6/2022/SPKT/POLDA SUMUT, 4 Juni 2022

Sumatera Utara menunjuk/menetapkan Wakil Bupati Palas sebagai Plt. Bupati Palas, Ahmad Zarnawi Pasaribu dengan Surat No.132/12201/1021 tanggal 24 November 2021¹⁷.

c. DPRD Palas melayangkan surat kepada Mendagri untuk meminta TSO diaktifkan kembali

Pada November 2022, DPRD Palas melayangkan surat kepada Mendagri untuk meminta Bupati Palas akrab disapa TSO diaktifkan kembali. Kemendagri kemudian membalas surat tersebut dan mengeluarkan surat legitimasi atau kekuatan hukum untuk Bupati Ali Sutan Harahap dalam memimpin Kabupaten Palas. Dalam surat bernomor 100.2.1.3/8591/OTDA/ tanggal 29 November 2022, yang ditandatangani Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. H Suhajar Diantoro MSi, berisi tiga poin.

Pertama, merujuk Pasal 91 ayat 2 huruf b UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lewat surat No. 190/7584/OTDA tanggal 26 Oktober 2022, Kemendagri telah meminta Gubernur Sumut untuk memonitor sekaligus mengevaluasi kerja penyelenggaraan Pemkab Palas. Kedua, menyusul kondisi kesehatan yang telah pulih dan itu disertai surat keterangan medis, Kemendagri merestui Ali Sutan kembali menjalankan kewenangannya sebagai Bupati Palas. Ketiga, Kemendagri menegaskan soal Bupati Ali Sutan sebagai pengambil kebijakan utama administrasi di Kabupaten Palas, jika itu tidak dapat dilakukan, Kemendagri memutuskan kebijakan dapat dilakukan Wakil Bupati Palas atas nama Bupati Palas.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Irham Buana Nasution, mengatakan dengan adanya surat dari Kemendagri itu, maka tidak ada alasan untuk DPRD Palas untuk tidak menindaklanjuti. Ia meminta DPRD Padang Lawas secepatnya menghadap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. "Mereka wajib dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk meminta kepada gubernur, agar mengaktifkan kembali Bapak Ali Sutan Harahap sebagai Bupati Padang Lawas¹⁸. Fungsi pemerintahan kabupaten kan harus dijalankan oleh bupati yang definitif,. Namun Gubernur Sumut tidak menindaklanjuti surat tersebut. Sejak saat itu terjadi dualisme kepemimpinan di Padanglawas.

d. TSO dan Zarnawi sama-sama melantik pejabat pada hari yang sama

¹⁷ Penunjukan Ahmad Zarnawi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Padang Lawas," Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, No. 132/12201/1021 tanggal 24 November 2021,

¹⁸ DN, "TSO Bakal Aktif Kembali Jabat Bupati Palas", *Deser News*, 3 Desember 2022, <https://desernews.com/tso-bakal-aktif-kembali-jabat-bupati-palas/>

Kondisi makin memanas pada awal tahun ini, tepatnya 25 Januari 2023, dimana Plt Bupati Palas Ahmad Zarnawi mencopot tiga kepala dinas. Yakni Kepala Dinas Koperindag dan UMKM, Kepala BK dan SDM, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pada hari yang sama, Bupati Padanglawas H. Ali Sutan Harahap (melantik Gojali SE sebagai Sekretaris Daerah Palas, menggantikan Arpan Nasution, di Kantor Bupati Palas komplek SKPD Terpadu Sigala-gala, Rabu (25/1/2023). Pelantikan tersebut sesuai surat perintah tugas nomor: 800/376/2023 yang ditanda tangani oleh Bupati Palas, Ali Sutan Harahap dan disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya manusia (BKPSDM), Adi Putra Halomoan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ahmad Faisal Siregar SP, Inspektur Pembantu (Irbn III), Inspektorat Palas, Helmi Gunawan Harahap, serta pejabat lainnya.

Dalam surat penunjukan itu, Gojali SE terhitung sejak 25 Januari 2023, di samping jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan Palas, juga sebagai Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Sekretaris Daerah Palas. Usai penyerahan SK tersebut, Gojali SE diantar langsung TSO ke ruangan Sekda untuk bekerja sebagai Sekda Palas. Sejak saat itu terjadi dualisme kepemimpinan di beberapa OPD. Pimpinan OPD yang dijabat dua orang yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dierindag), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), Badan Kepegaeaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKD), serta Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang).

Selain pimpinan OPD setingkat eselon II, pejabat eselon tiga juga terdapat beberapa posisi di jabat dua orang. Akibat adanya dua pimpinan dalam satu OPD, pelayanan publik di Palas ikut terganggu. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pernah didemo warga Palas akibat dualiseme ini. Namun ia malah mengusir massa pendukung Bupati Palas, Ali Sutan Harahap di Kantor Gubernur Sumut.

e. Mendagri Tito Karnavian secara resmi mengaktifkan kembali Ali Sutan Harahap pada 2 Maret 2023

Guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Padanglawas (Palas) Mendagri, Tito Karnavian secara resmi mengaktifkan kembali Ali Sutan Harahap atau TSO sebagai bupati. Hal tersebut tertuang dalam surat Mendagri Tito Karnavian Nomor

100.2.7/1284/SJ tertanggal 2 Maret 2023¹⁹. Surat yang ditandatangani langsung oleh Mendagri Tito Karnavian itu ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Sedangkan surat Mendagri Tito Karnavian itu dikeluarkan berdasarkan keterangan sehat yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 192/H/RSCM-K/XI/2022 tanggal 15 November 2022.

Berikut isi surat Mendagri Tito Karnavian yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Palas.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Padanglawas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Merujuk Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berwenang pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 192/H/RSCM-K/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dan hasil pemeriksaan fungsi luhur pada tanggal 1 Desember 2022 pada Pusat Layanan Terpadu Saraf, Tulang Belakang dan Otak Neuroscience Centre RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo, Bupati Padanglawas telah dintakan sehat.
2. Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dengan dalam poin 1 (satu) di atas, Bupati Padanglawas agar kembali melaksanakan tugas dan wewenangnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Padanglawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Padanglawas serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

f. TSO melantik kembali pejabat yang dicopot Zarnawi

Perpegang surat dari Mendagri tersebut, Bupati TSO merasa pede sebagai bupati aktif dan melantik kembali empat kepala OPD yang dicopot Plt. Bupati Palas, Ahmad Zarnawi Pasaribu pada Jumat (10/3/2023) pekan lalu²⁰. Keempat OPD yang dicopot Ahmad Zarwani

¹⁹ Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, *secara resmi mengaktifkan kembali Ali Sutan Harahap (TSO) sebagai Bupati Padang Lawas*, sebagaimana tertuang dalam Surat Mendagri Nomor 100.2.7/1284/SJ tertanggal 2 Maret 2023

²⁰ Redaksi, "Aktif Jadi Bupati Palas, TSO Lantik Kembali Kepala OPD yang Dicopot, Gubsu: Jangan

Memancing Ribut", *Sumut Pos* 14 Maret 2023, <https://sumutpos.jawapos.com/sumatera-utara/2374353755/aktif-jadi-bupati-palas-tso-lantik-kembali-kepala-opd-yang-dicopot-gubsu-jangan-memancing-ribut>

dan kembali dilantik TSO yakni, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Gojali Ritonga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ahmad Faisal Siregar. Kemudian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Adi Putra Halomoan Hasibuan, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Palas, Yenny Nurlina Siregar.

Selain itu, ada juga Analis Kepegawaian Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Subriadi Daulay, dan Ashari Gunung Hasibuan diangkat sebagai Plt. Administrator selaku Sekeretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Para pejabat OPD itu, dilantik sesuai dengan surat keputusan ditandatangani TSO sebagai Bupati Palas tertanggal 9 Maret 2023.

g. Gubernur Edy abaikan surat Mendagri

Meski sudah ada surat via pesan WhatsApp dari Mendagri terkait pengaktifan kembali TSO, Gubernur Edy tidak mengindahkannya. "Tidak ada, wewenang itu ada di Gubernur. Sebelum Gubernur merestuinnya secara hukum, bukan merestui kepribadian karena kemauan Gubernur. Ada aturan main," sebut Edy kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (13/3) siang.

Ia meminta kepada seluruh pihak terkait, untuk tidak memancing polemik dan harus bisa menahan diri. Sehingga roda pemerintahan di Pemkab Palas dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. "Untuk itu, jangan mancing-mancing sehingga menjadi ribut masyarakat," katanya. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Pemprov Sumut, Juliadi Z Harahap mengungkapkan bahwa surat dari Mendagri itu, belum diterima pihaknya secara tertulis. Namun, baru dalam bentuk soft copy. "Surat (Mendagri) tersebut, belum kita terima resmi, tadi dari WhatsApp sudah ada dan surat dari menteri itu sedang kita tindak lanjuti. Dengan arti kata sedang kita telaah," ucap Juliadi.

Juliadi menjelaskan pihaknya akan melihat bagaimana fakta-fakta juga. Namun, untuk menekan polemik di Pemkab Palas itu, kedua belah pihak antara TSO dan Ahmad Zarnawi Pasaribu di Kantor Gubernur Sumut, beberapa waktu lalu.

"Kita juga sudah pernah rapat di sini, fakta-fakta yang dalam rapat itu. Untuk jadi bahan lah nanti sebagai, informasi tambahan kepada kita," jelas Juliadi²¹.

²¹ NS/BR, "Fraksi Golkar Minta Edy Aktifkan TSO Sebagai Bupati Palas" *Analisa Daily* 10 Maret 2023, https://analisadaily.com/berita/baca/2023/03/10/1039783/fraksi-golkar-minta-edy-aktifkan-tso-sebagai-bupati-palas/-google_vignette

Juliadi mengungkapkan bahwa dalam surat Mendagri itu, menyebutkan TSO sudah sembuh. Namun, pihak Pemprov Sumut akan melakukan pengecekan kembali kondisi kesehatannya dengan benar.

Peran Para Pemimpin Pondok Pesantren dalam Penyelesaian Konflik Dualisme

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam konteks sosial, dengan tujuan mendapatkan partisipasi sukarela dari bawahan untuk mencapai sasaran organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan arahan tetapi juga menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat memengaruhi reputasi dan keberhasilan organisasi. Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin memengaruhi bawahannya dengan karakteristik tertentu, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif.

Keberhasilan seorang pemimpin, antara lain, tergantung pada teknik kepemimpinannya dalam menciptakan situasi yang mampu membangkitkan kesadaran pada orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan apa yang diinginkan. Seorang pemimpin biasanya memiliki kelebihan dibandingkan yang lain, tidak peduli bagaimana kelompok itu terbentuk. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena setiap manusia memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Menurut Stoner kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai sesuatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.²²

Peran pemimpin pondok pesantren dalam Penyelesaian Konflik dualisme kepemimpinan di Kabupaten Padang Lawas tahun 2021-2023 Di temukan oleh penulis melalui wawancara dengan tokoh Pimpinan Pesantren di Kabupaten Padang Lawas. Adapun bagaimana Hubungan Pemerintah Padang Lawas dengan pimpinan pesantren di utarakan oleh bapak Ustadz H.Ahmad Sanusi Abad Siregar, Ustadz H.Lukmanul Hakim Hsb, Ustadz Faisal Haris Harahap,Ustadz Pokih Nasution,

Disampaikan oleh Ustadz H.Lukmanul Hakim Hsb²³

“Hubungan Pemerintah Padang Lawas dengan pimpinan pesantren sangat baik ,ini ditandai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan bantuan sarana maupun prasarana. Kemudian perhatian khusus kepada pesantren sebab prestasi yang ditorehkan pesantren sudah banyak, bahkan mengangkat harkat dan martabat kabupaten Padang Lawas dalam berbagai even lokal,regional, maupun Nasional.’

²² Umam, Khaerul. 2012. Manajemen Organisasi. (Bandung: Pustaka Setia) , h. 156

²³ Wawancara, Ustadz H.Lukmanul Hakim Hsb.Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl 20 September 2023

Bagaimana Konflik ini Pandangan pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Padang Lawas
“Perkara Dualisme kepemimpinan di Padang Lawas pernah jadi bahan perbincangan sewaktu rapat pimpinan pesantren, namun tidak terlibat langsung. Tetapi selalu memikirkan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan perkara tersebut”

Disampaikan oleh Ustadz H.Ahmad Sanusi sebab-sebab lahirnya konflik ini menurut pandangan pimpinan pesantren

“Lahirnya konflik ini kemungkinan didasari oleh kurangnya pemahaman segelintir orang terhadap aturan yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan, ada juga merasa tersingkirkan dan kurang mendapat perhatian serta tidak terpenuhi apa yang ia inginkan.”

Tanggapan pimpinan pesantren yang memprovokasi satu sama lain agar pertikaian ini tetap berlangsung

“Memberikan nasehat kepada orang yang memprovokasi agar dapat menahan diri serta mencari solusi yang lebih baik dan tetap menjaga silaturahmi. Karena jika konflik terus berlanjut bukan hanya merugikan sepihak tapi berdampak pada proses berjalannya roda pemerintahan dengan baik. Dengan demikian akan berdampak pada pelayanan masyarakat.”²⁴

Bagaimana pandangan kacamata pimpinan pesantren dalam menyelesaikan konflik dualisme ini

“Dalam menyelesaikan Dualisme kepemimpinan di Padang lawas seyogyanya diselesaikan dengan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat serta memperhatikan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai menurut aturan.”

Disampaikan oleh Ustadz Faisal Haris Harahap²⁵ Pimpinan pesantren terdapat ikut berpolitik baik menyelesaikan konflik ataupun sebaliknya? Mendukung salah satu pihak

“Pimpinan pesantren tetap berada di tengah tanpa memihak dan mendukung kepada salah satu pihak yang bertikai, tetapi selalu mengikuti petunjuk dan arahan dari Pemerintah Propinsi dan Kementerian Dalam negeri.”

Bagaimana karakteristik pimpinan pesantren yang ikut andil dalam menyelesaikan konflik ini?

²⁴ Wawancara, 2023Ustadz H.Ahmad Sanusi Abad Siregar .Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl 20 September

²⁵ Wawancara, Ustadz Faisal Haris Harahap.Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl 20 September 2023

“Karakter pimpinan Pesantren yang ikut andil dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Pemerintah Padang Lawas hanya orang-orang yang merasa terpanggil dan tidak ingin masyarakat Padang Lawas terpecah belah karena ulah daripada oknum-oknum tertentu”

Argumen Ustadz Pokih Nasution terkait hikmah dari konflik ini menurut pimpinan pesantren “Hikmah dari konflik ini menurut kami memberikan manfaat bagi dua kelompok: Bagi masyarakat, dapat mencerdaskan pemikiran dan kedewasaan dalam berpolitik sehingga tidak mudah diprovokasi dan selalu taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap menjaga silaturahmi Bagi Pemerintah, agar selalu menjaga kekompakan dan meningkatkan soliditas dan solidaritas diantara pegawai serta memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing di seluruh instansi perkantoran yang ada di kabupaten Padang Lawas”²⁶

H.Fauzan Hamidi Hsb,S.Pd S.Th.I sebagai Ketua BSPPL Kabupaten Padang Lawas menyampaikan²⁷

“terkait konflik Dualisme Kepemimpinan Antara Bupati Padang Lawas dengan Wakil Bupati Padang Lawas bukan lagi siapa yang paling berhak memimpin, tapi bagaimana masyarakat Palas bisa lebih nyaman beraktifas dalam kesehariannya. Tidak dilingkupi rasa tak nyaman dan bingung, siapa sebenarnya yang harus diikuti diantara dualisme kepemimpinan yang terjadi di Palas.”

Penulis Menyimpulkan Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial dalam manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan juga mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan dalam inggris adalah hubungan yang adalah dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejak manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Peran politik pimpinan pondok pesantren dalam mengevaluasi dualisme kepemimpinan di Kabupaten Padang Lawas 2021-2023. Hubungan Pemerintah Padang Lawas dengan pimpinan pesantren terdiri dari bapak adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana. Kemudian perhatian khusus kepada pesantren sebab prestasi yang ditorehkan pesantren sudah banyak, bahkan

²⁶ Wawancara, Ustadz Pokih Nasution.Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl 20 September 2023

²⁷Wawancara. H.Fauzan Hamidi Hsb,S.Pd S.Th.I sebagai Ketua BSPPL Tgl 20 September 2023

mengangkat harkat dan martabat kabupaten Padang Lawas dalam berbagai even lokal, regional, maupun Nasional.

Penyelesaian konflik Bupati Padang Lawas sudah menempuh upaya perdamaian secara konsiliasi dan mediasi menemukan jalan penyelesaian yang terbaik menurut kedua belah pihak, konsiliasi dilakukan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa dualisme kepemimpinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran politik pimpinan pondok pesantren dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Kabupaten Padang lawas tahun 2021-2023. Melalui wawancara dengan tokoh Pimpinan Pesantren di Kabupaten Padang Lawas penulis menemukan peran pimpinan pesantren dalam menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan di Padang Lawas antara lain : *Pertama*, "Dalam menyelesaikan Dualisme kepemimpinan di Padang lawas pimpinan pesantren berpendapat konflik seyogyanya diselesaikan dengan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat serta memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Pimpinan pesantren tetap berada di tengah tanpa memihak dan mendukung kepada salah satu pihak yang bertikai. *Ketiga*, pimpinan pesantren memberikan saran dan pertimbangan kepada kedua belah pihak untuk mengedepankan persatuan sesuai ajaran Islam yang dianut serta mengajak masyarakat untuk menghindari konflik akibat dualisme tersebut melalui mimbar-mimbar agama.
2. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik dualisme di Kabupaten Padang Lawas tahun 2021-2023 diselesaikan secara hukum, disertai Konsolidasi diantara kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui, Mendagri telah menindaklanjuti perihal Penugasan Wakil Bupati Padang Lawas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, M.Si, MH, sebagai Pelaksana Tugas Bupati Padang Lawas dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3/2482/SJ, tertanggal 08 Mei 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Terjemahan. Kemenag, (Jakarta jalan raya pondok rannggon, 2020).

Dany Haryanto, S.S andG. Edwi Nugroho, S.S., M.A.,Pengantar Sosiologi Dasar,(Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2007).

Fakultas Syariah dan Hukum Uinsu, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prena Damedia Group (2016).

Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Stabat: CV. Perdana Mulya Sarana, 2010)

Fred. Schwarz, *You Can Trust the Communists*. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. 1960) Hlm. 71

George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*.(Jakarta : Rajawali press 2010)

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Grasindo 2007).

<https://www.hadits.id/hadits/dawud/2540>

<https://www.hadits.id/hadits/nasai/4140>.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6622840/surat-ali-imran-ayat-104-penyeru-amar-maruf-nahi-munkar-adalah-yang-beruntung>

Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Social*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

Hugh Miall, Oliv cer Ramsbothman Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta 2002 , PT Raja Grafindo Persada

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39955>.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera UtaraPdf

Imam Al-Mawardi. *Adabud Dunia wad Din* (Beirut, Darul Fikr: 1992 M/1412 H).

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam* ; Serial Book · ind · Jakarta Darul Falah , 2006.

Jurnal Oleh Ridwan Universitas Muara Bungsu dengan judul *Dualisme Kepemimpinan Adat Di Desa (Dilema Kekuasaan Adat Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Dusun Batu Kerbau, Kec.Pelepat,Kabupaten Bungo)*. (2018).

Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Sekolah, Madrasah Pendidikan Islam Dalam Kurun Waktu Modern* (Jakarta: LP3ES, 1996).

Muhammad, Rusdji Ali. 2000. *Politik Islam: Sebuah pengantar*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).

Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Jakarta: P3M, 1986).

Nawawi, Hadari & Hadari, M. Martini. 2004. *Kepemimpinan yang Efektif*. (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta).

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Salim dkk, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi* (Jakarta: Grup Media Prenada, 2014).

Siagian, P. Sondang, *Teori dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009),

Undang- undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.Pdf

Skripsi Iskandar dengan judul *Strategi Media Dalam Manajemen Krisis Dualisme Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017.

Skripsi Muhammad Aziz Soleh.. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Sumber: Padang Lawas dalam angka 2012 Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang lawas. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas berjumlah sekitar 227.365 jiwa.

Team Penyusunan Kamus Besar, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1990).

Undang- undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.Pdf

Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. (Bandung: Pustaka Setia)

www.wikipedia.com /09/26/2007, 11;28 AM. Pesantren.

Wawancara, Ustadz H.Lukmanul Hakim Hsb.Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl 20 September 2023

Wawancara, Ustadz H.Ahmad Sanusi Abad Siregar .Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl 20 September 2023

Wawancara, Ustadz Faisal Haris Harahap.Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl
20 September 2023

Wawancara, Ustadz Pokih Nasution.Pimpinan Pesantren Kabupaten Padang Lawas, Tgl 20
September 2023

Wawancara, H.Fauzan Hamidi Hsb,S.Pd S.Th.I sebagai Ketua BSPPL Kabupaten Padang
Lawas, Tgl 20 September 2023